

## PENDEFINISIAN DAN PROSES BISNIS KEGIATAN POKOK

Nama Eselon I	: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi Inovasi Balitbangtan Pada Satker BPATP
Definisi Kegiatan	: Penyelenggaraan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian dengan sasaran terdapatnya 43 HKI dan terkelolanya 10 kerja sama lisensi senilai Rp2.396.901.000,00

No.	Tahapan/Proses Bisnis	Sub-Output
<b>A Persiapan</b>		
1	Perencanaan Anggaran dan Kegiatan	Dokumen anggaran (Rencana Kertas Kerja Satker, ToR, RAB)
2	Pengorganisasian Kegiatan	SK Tim Pengelola HKI, SK Tim Verifikasi Kelayakan dan SK Tim Monev Kegiatan Alih Teknologi
3	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis	Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kerja Sama Alih Teknologi
<b>B Pelaksanaan</b>		
1	Pendaftaran HKI	Bukti Pendaftaran HKI
2	Promosi	Hasil penelitian yang sudah didaftarkan HKI dipromosikan kepada dunia usaha melalui publikasi, forum temu bisnis, dan komunikasi bisnis
3	Seleksi Calon Mitra	Laporan hasil verifikasi calon mitra dari tim verifikasi ke Kepala BPATP
4	Pengajuan Nota Dinas Hasil Verifikasi dari Kepala BPATP cq Setba ke Kepala Badan	Nota Dinas Hasil Verifikasi diterima oleh Kepala Badan
5	Rekomendasi Kepala Balitbangtan atas Hasil Verifikasi Permohonan Lisensi	Disposisi Kepala Balitbangtan atas Hasil Verifikasi Permohonan Lisensi
6	Mediasi, Penyusunan, dan Penulisan Perjanjian Lisensi	Draft final perjanjian lisensi
7	Penandatanganan Perjanjian Lisensi	Perjanjian Lisensi yang sudah di tandatangani dan diberi nomor
<b>C Monitoring dan Evaluasi</b>		
1	Monitoring dan Evaluasi	Hasil verifikasi secara periodik atas pelaksanaan lisensi sesuai dengan perjanjian dan Laporan komersialisasi terkait jumlah royalti yang harus dibayarkan oleh mitra kerja sama lisensi.
<b>D Pelaporan</b>		
1	Penyusunan laporan akhir tahun kegiatan	Laporan akhir tahun kegiatan
2	Pencatatan Aset Tak Berwujud pada Laporan Keuangan	HKI disajikan sebagai Aset Tak Berwujud pada Laporan Keuangan
<b>OUTPUT KEGIATAN</b>		
Terkelolanya 10 kerja sama lisensi dan terdapatnya 43 HKI		

Subkoordinator Pelayanan Alih Teknologi  
Satker BPATP Balitbangtan

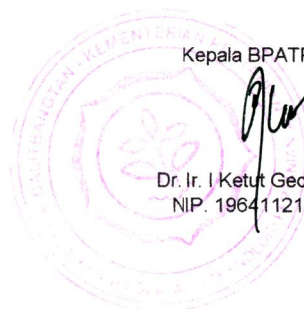
Nurjaman, S. TP, M. M  
NIP. 19801026 200901 1 00 5

Bogor, 23 April 2021  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker BPATP Balitbangtan

Yadi Rusyadi, S. Si., M. Si  
NIP. 19700209 200003 1 00 1

Kepala BPATP Balitbangtan

Dr. Ir. I Ketut Gede Mudiarta, M. Si  
NIP. 19641121 299101 1 00 1



**REGISTER RISIKO KEGIATAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ALIH TEKNOLOGI INVENSI BALITBANGTAN PADA SATKER BPATP**

Lampiran 2

No	Proses Bisnis	Register Risiko	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Dampak	Aktivitas Pengendalian	Sisa Risiko
A	Persiapan				Sumber	U/C	Uraian			
1	Perencanaan Anggaran dan Kegiatan	R.1	Alokasi anggaran tidak mencukupi	KPA dan Sub Koordinator Pelayanan Alih Teknologi	Refocusing Anggaran Kegiatan	U	Alokasi anggaran tidak mencukupi karena refocusing anggaran kegiatan	Target kegiatan tidak tercapai.	Efisiensi pelaksanaan kegiatan	
2	Pengorganisasian Kegiatan	R.2	Tim Pengelola HKI, Tim Verifikasi Kelayakan dan SK Tim Monev Kegiatan Alih Teknologi tidak ditetapkan secara formal	Kepala BPATP	Penetapan Tim Pengelola HKI, Tim Verifikasi Kelayakan dan SK Tim Monev Kegiatan Alih Teknologi dilakukan secara informal	C	Tim Pengelola HKI, Tim Verifikasi Kelayakan dan SK Tim Monev Kegiatan Alih Teknologi tidak ditetapkan secara formal karena penetapannya dilakukan secara informal	Pelaksanaan tugas kurang terorganisir dengan baik	Menetapkan Tim Pengelola HKI, Tim Verifikasi Kelayakan dan SK Tim Monev Kegiatan Alih Teknologi tidak ditetapkan secara formal	
		R.3	Tim Pengelola HKI, Tim Verifikasi Kelayakan dan SK Tim Monev Kegiatan Alih Teknologi kurang kompeten	Kepala BPATP	Terbatasnya SDM	C	Tim Pengelola HKI kurang kompeten karena terbatasnya SDM	Pendaftaran HKI terhambat	Sharing knowledge	
								Verifikasi Kelayakan kurang optimal	Koordinasi dan penetapan jadwal verifikasi	
							Tim Monev Kegiatan Alih Teknologi kurang optimal	Koordinasi dan penetapan jadwal monev		
3	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis	R.4	Juklak Juknis kurang lengkap atau kurang operasional	KPA	Kurang lengkapnya dasar hukum untuk dijadikan acuan penyusunan juklak juknis	C	Juklak Juknis kurang lengkap atau kurang operasional karena kurang lengkapnya dasar hukum untuk dijadikan acuan penyusunan juklak juknis	Pelaksanaan kegiatan kurang terarah	Koordinasi dengan instansi terkait operasionalisasi pelaksanaan kegiatan	
B	Pelaksanaan									
1	Pendaftaran HKI	R.5	Inventor terlambat dalam melengkapi dokumen persyaratan	PJ Kegiatan	Inventor tidak mengadministrasikan dokumen hasil penelitian dengan tertib	C	Inventor terlambat dalam melengkapi dokumen persyaratan karena tidak mengadministrasikan dokumen hasil penelitian dengan tertib	Pendaftaran HKI terhambat	Tim pengelolaan HKI lebih intensif berkoordinasi dengan inventor	
		R.6	Hasil penelitian/ pemuliaan yang didaftarkan tidak mengandung kebaharuan (novelty)	PJ Kegiatan	Pembanding paten hanya mengacu pada jurnal penelitian	C	Hasil penelitian yang didaftarkan tidak mengandung kebaharuan (novelty) karena pembanding paten hanya mengacu pada jurnal penelitian	Sertifikat HKI / Hak PVT tidak dapat diterbitkan	Memperbanyak referensi paten / PVT pembanding	
2	Promosi	R.7	Promosi kurang efektif	PJ Kegiatan	Recofusing anggaran	C	Promosi kurang efektif karena recofusing anggaran	Invensi tidak terpromosikan secara luas	Mencari media promosi alternatif yang low budget	
3	Seleksi Calon Mitra	R.8	Calon mitra tidak memenuhi persyaratan	PJ Kegiatan	Dokumen administrasi dan persyaratan teknis produksi calon mitra tidak memadai	C	Calon mitra tidak memenuhi persyaratan karena Dokumen administrasi dan persyaratan teknis produksi calon mitra tidak memadai	Proses seleksi calon mitra tertunda	Berkoordinasi dengan calon mitra untuk pemenuhan persyaratan dokumen administrasi dan teknis produksi	
		R.9	Kesalahan proses verifikasi calon mitra	PJ Kegiatan	Tim sumber verifikasi kelayakan tidak kompeten	C	Kesalahan proses verifikasi calon mitra karena Tim sumber verifikasi kelayakan tidak kompeten	Kerja sama tidak terlaksana sesuai perjanjian	Menugaskan tim verifikasi kelayakan yang kompeten	
4	Pengajuan Nota Dinas Hasil Verifikasi dari Kepala BPATP cq Setba ke Kepala Badan Litbang	R.10	Pengajuan Nota Dinas Hasil Verifikasi terlambat	Kepala BPATP	Kesibukan Kepala BPATP	C	Pengajuan Nota Dinas Hasil Verifikasi terlambat karena Kesibukan Kepala BPATP	Disposisi Kepala Balitbangtan atas Hasil Verifikasi Permohonan Lisensi terbit lebih dari 15 hari kerja	Pengaturan batasan waktu pengajuan Nota Dinas Hasil Verifikasi dari Kepala BPATP cq Setba ke Kepala Badan Litbang pada Juknis	
5	Rekomendasi Kepala Balitbangtan atas Hasil Verifikasi Permohonan Lisensi	R.11	Penerbitan Rekomendasi Kepala Balitbangtan atas Hasil Verifikasi Permohonan Lisensi terlambat	Kepala Badan Litbang	Kesibukan Kepala Badan Litbang	C	Penerbitan Rekomendasi Kepala Balitbangtan atas Hasil Verifikasi Permohonan Lisensi terlambat karena Kesibukan Kepala Badan Litbang	Penerbitan Rekomendasi Kepala Balitbangtan atas Hasil Verifikasi Permohonan Lisensi terbit lebih dari 15 hari kerja	Pengaturan batasan waktu Penerbitan Rekomendasi Kepala Balitbangtan atas Hasil Verifikasi Permohonan Lisensi	



No	Proses Bisnis	Register Risiko	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab		Dampak	Aktivitas Pengendalian	Sisa Risiko	
					Sumber	U/C				Uraian
6	Mediasi, Penyusunan, dan Penulisan Perjanjian Lisensi	R. 12	Tidak ada kesepakatan antara para pihak	PJ Kegiatan	Kebijakan internal calon mitra kerja sama tidak sesuai dengan aturan dan regulasi pemerintah	C	Tidak ada kesepakatan antara para pihak karena Kebijakan internal calon mitra kerja sama tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Perjanjian lisensi tidak terealisasi	Klausul perjanjian lisensi tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan	
7	Penandatanganan Perjanjian Lisensi	R. 13	Naskah kerja sama tidak ditandatangani	PJ Kegiatan	Salah satu pihak yang ditunjuk tidak hadir pada saat penandatanganan perjanjian lisensi	C	Naskah kerja sama tidak ditandatangani karena Salah satu pihak yang ditunjuk tidak hadir pada saat penandatanganan perjanjian lisensi	Penandatanganan perjanjian lisensi tertunda	Menjadwalkan ulang waktu penandatanganan perjanjian lisensi dan memastikan kehadiran para pihak	
C Monitoring dan Evaluasi										
1	Monitoring dan Evaluasi	R. 14	Monitoring dan evaluasi kurang optimal	KPA, PPK dan Penanggung Jawab Kegiatan	Anggaran Movev kurang memadai	C	Monitoring dan evaluasi kurang optimal karena Anggaran Movev kurang memadai	Progres kegiatan tidak dapat diketahui secara tepat dan cepat	Mengusulkan penambahan anggaran Movev	
				KPA, PPK dan Penanggung Jawab Kegiatan	Keterbatasan personil Movev	C	Monitoring dan evaluasi kurang optimal karena keterbatasan personil Movev		Mengusulkan penambahan tim Movev	
				KPA, PPK dan Penanggung Jawab Kegiatan	Kurangnya frekuensi pelaksanaan Movev dan penagihan royalti	C	Monitoring dan evaluasi kurang optimal karena Kurangnya frekuensi pelaksanaan Movev dan penagihan royalti	Mitra kerja sama tidak melaksanakan kewajiban pembayaran royalti sesuai perjanjian lisensi	Menetapkan mekanisme pembayaran royalti melalui pemotongan langsung dari sumber transaksi per transaksi	
		R. 15	Kesalahan memverifikasi laporan komersialisasi	KPA, PPK dan Penanggung Jawab Kegiatan	Tim movev kurang cermat	C	Kesalahan memverifikasi karena tim movev kurang cermat	Kurangnya pembayaran royalti mitra kerja sama	Membuat formulir kertas kerja dan langkah kerja verifikasi	
					Data dukung laporan komersialisasi mitra kerja sama tidak lengkap	C	Kesalahan memverifikasi laporan komersialisasi karena Data dukung laporan komersialisasi mitra kerja sama tidak lengkap	Kesalahan penghitungan jumlah royalti yang harus dibayarkan oleh mitra kerja sama	Berkoordinasi dengan mitra kerja sama untuk melengkapi data dukung	
D Pelaporan										
1	Penyusunan laporan akhir tahun kegiatan	R. 16	Laporan akhir tahun terlambat disusun	Penanggung jawab kegiatan	Data dukung laporan akhir tidak lengkap	C	Laporan akhir tahun terlambat disusun karena Data dukung laporan akhir tidak lengkap	Laporan akhir tahun belum dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan	Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi dokumen yang dimaksud	
2	Pencatatan Aset Tak Berwujud pada Laporan Keuangan	R. 17	HKI belum dicatat sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan	Kuasa Pengguna Barang	Belum terdapat pedoman cara pengakuan, pengukuran dan pencatatan nilai ATB	C	HKI belum dicatat sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan karena Belum terdapat pedoman cara pengakuan, pengukuran dan pencatatan nilai ATB	Laporan keuangan tidak akurat	Berkoordinasi (melalui surat/ diskusi/ FGD) dengan Setjen dan Badan Litbang dalam penyusunan pedoman cara pengakuan, pengukuran dan pencatatan nilai ATB	
		R. 18	Saldo ATB berupa HKI di dalam Laporan Keuangan belum menunjukkan nilai wajar	Kuasa Pengguna Barang	Belum terdapat pedoman cara pengakuan, pengukuran dan pencatatan nilai ATB	C	Saldo ATB berupa HKI di dalam Laporan Keuangan belum menunjukkan nilai wajar karena Belum terdapat pedoman cara pengakuan, pengukuran dan pencatatan nilai ATB			

Subkoordinator Pelayanan Alih Teknologi  
Satker BPATP Balitbangtan

Nurjanah, S. TP, M. M  
NIP. 19801026 200901 1 00 5

Kepala BPATP Balitbangtan

Dr. Ir. I Ketut Gede Mudiarta, M. Si  
NIP. 19641121 299101 1 00 1

Bogor, 23 April 2021  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker BPATP Balitbangtan

Yadi Rusyady, S. Si, M. Si  
NIP. 19700209 200003 1 00 1